



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 April 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAFRIN ARIFIN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **987714**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.020.000.000

1. MOBIL, NISSAN NISSAN KICK E POWER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NAV 1 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 222.523.881

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.723.523.881

III. HUTANG Rp. 1.556.140.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.167.383.881



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.